

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PULAU KOMANG
SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara



OLEH

**MAIDI FIKRI
NPM. 190411029**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI DESA PULAU KOMANG KECAMATAN
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
NAMA : MAIDI FIKRI
NPM : 190411029
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

DESRIADI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1022018302

ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MAIDI FIKRI
NPM : 190411029
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Taluk Kuantan, 2 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan

MAIDI FIKRI
NPM. 190411029

MOTTO HIDUP

“Pedang Terbaik yang Dimiliki Ialah Sebuah Kesabaran Tanpa Batas “

“Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang Mengatakannya. “

“Jawaban dari Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar dan Tak Kenal Putus Asa”

Kata Persembahan

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.”

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya, dan saya persembahkan untuk semua Keluarga Tercinta terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan, terimakasih atas kehadiran kalian dalam hidupku”

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

MAIDI FIKRI
NPM. 190411029

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik Penarikan Sampel yang digunakan peneliti untuk Perangkat Desa adalah Sampel Jenuh yakni Semua populasi dijadikan sampel yang berjumlah 6 orang, dan sampel untuk Masyarakat Pulau Komang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menggunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu yang berjumlah 41 Orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata 126 berarti berada pada interval Cukup Baik, serta hasil observasi penulis memang sudah cukup baiknya Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan keseluruhan indikator yang diuji yakni adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berprestasi sudah cukup baik.

Kata Kunci : Partisipasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

Community Participation in Paying Land and Building Tax (PBB) in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District Kuantan Singingi Regency

MAIDI FIKRI
NPM. 190411029

This research was carried out in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District. The aim of this research is to find out how community participation is in paying land and building taxes (PBB) in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is how community participation is in paying land and building taxes (PBB) in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique used by researchers for Village Apparatus is a Saturated Sample, that is, the entire population is sampled, totaling 6 people, and the sample for the Komang Island Community according to the Tax Payable Notification Letter (SPPT) uses Simple Random Sampling, that is, sampling members from the population is carried out randomly. without paying attention to the existing strata in the population, which is 41 people. The data analysis used is quantitative descriptive, namely analyzing data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing it, and then the author draws conclusions from the results of processing the data. The results of the distribution of questionnaires showing Community Participation in Paying Land and Building Tax (PBB) in Pulau Komang Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency produced an average value of 126, meaning it is in the Fairly Good interval, and the results of the author's observations are that Community Participation is quite good. In paying land and building tax (PBB), the overall indicators tested are the opportunity given to the community, the community's willingness to participate, and the community's willingness to achieve is quite good.

Keywords : Participation in Paying Land and Building Taxes

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PULAU KOMANG KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Bapak Desriadi, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini
5. Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

7. Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
8. Rekan - rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Taluk Kuantan, 2 Agustus 2023

MAIDI FIKRI
NPM. 190411029

DAFTAR ISI

Halaman :

TANDA PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Aspek Teoritis	5
1.4.2 Aspek Praktis.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Kajian pustaka	6
2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara.....	6
2.1.2 Teori/konsep Partisipasi.....	10
2.1.3 Teori/Konsep Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
2.2 Kerangka Pemikiran	21
2.3 Hipotesis.....	22
2.4 Defenisi Operasional.....	22
2.5 Konsep Variabel	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sampel.....	25
3.2.1 Populasi.....	25
3.2.2 Sampel	26
3.3 Sumber Data Penelitian.....	27

3.3.1 Data primer.....	27
3.3.2 Data sekunder	28
3.4 Lokasi Penelitian	28
3.5 Metode Pengumpulan data.....	28
3.6 Metode Analisis Data.....	29
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
4.1. Gambaran Umum Desa Pulau Komang Sentajo	31
4.2. Demografi	32
4.2.1 Batas Wilayah Desa	32
4.2.2 Luas dan Batas Wilayah	33
4.2.3 Penduduk	33
4.2.4 Lembaga Pendidikan	34
4.2.5 Keagamaan	35
4.2.6 Struktur Organisasi Desa.....	36
4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
5.1 Identitas Responden.....	44
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	44
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	45
5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	46
BAB VI PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel :

Halaman :

2.1 :	Konsep Operasional Variabel Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	23
3.1 :	Populasi dan Sampel Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	27
3.2 :	Jadwal penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi..	30
4.1	Dusun yang ada di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	32
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	33
4.3	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
4.4	Jumlah Sarana Pendidikan didesa Pulau Komang	34
4.5	Jumlah Sarana olahraga didesa Pulau Komang	35
4.6	Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Pulau Komang	35
4.7	Jumlah Rumah Ibadah Didesa Pulau Komang	36
5.1	Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin	44
5.2	Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur	44
5.3	Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan.....	45
5.4	Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
5.5	Tanggapan Responden tentang Infonnasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.....	47
5.6	Tanggapan Responden mengenai Petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang	48
5.7	Tanggapan Responden mengenai informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya.....	49

5.8	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	50
5.9	Tanggapan Responden tentang tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB	52
5.10	Tanggapan Responden mengenai ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB.....	53
5.11	Tanggapan Responden mengenai Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB	54
5.12	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	55
5.13	Tanggapan Responden tentang kemampuan masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya	57
5.14	Tanggapan Responden mengenai kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak	58
5.15	Tanggapan Responden mengenai kemudahan akses masyarakat dalam membayar PBB.....	60
5.16	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan PBB	61
5.17	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator .	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman :
2.1 : Kerangka Pemikiran tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi..	22
4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik dinegara maju, Negara sedang berkembang, maupun Negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan pancasila.

Guna mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri negara seperti disebutkan di atas maka negara dalam membiayai pembangunan tersebut memerlukan sumber pendanaan yang cukup besar bila kita baca dari susunan APBN sumber pendapatan atau pemasukan dana yang yang diterima dari negara diperoleh dari dua sumber yaitu :

- Penerimaan dalam negeri
- Bantuan luar negeri.

Penerimaan dalam negeri dapat dikelompokkan secara garis besar yakni penerimaan yang diperoleh dari sektor minyak dan gas (Migas) dan sektor non migas atau dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan Pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi Negara, dan saat ini penerimaan negara dari sektor pajak semakin tumbuhkan ekonomi meningkat dan satbilitas politik yang stabil sedangkan penerimaan disektor Migas sesuai dengan hukum alam jika di eksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan pada masanya akan habis.

Dengan demikian pajak adalah primadona penerimaan Negara yang paling potensial. Untuk dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” untuk membangun dalam berbagai bidang termasuk untuk mampu menyediakan berbagai sarana prasarana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian sebagaimana diubah dan di perubahan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan terakhir sebagaimana diubah dengan ditetapkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dimensi baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang tercermin pada pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih mengedepankan penerapan asas desentralisasi mendapatkan perlakuan yang lebih dari pemerintah pusat.

Pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut adalah pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan diletakkan pada daerah Kabupaten Kota, maka untuk itu bagi Kab/Kota dibutuhkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam bentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Salah satu pendapatan daerah dari sektor pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana di atas diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000

tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Kabupaten Kuantan Singingi adalah merupakan salah satu kabupaten di provinsi Riau yang ditetapkan sebagai salah satu daerah otonomi berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Batam

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, merupakan Pajak Daerah. Dengan diadakannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkantoran di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Sentajo Raya tepatnya di Desa Pulau Komang Sentajo sudah berjalan pada umumnya, namun belum optimal. Berdasarkan data penerimaan PBB Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Pembayaran PBB Desa Pulau Komang

No	Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi Pokok Ketetapan			Sisa Pokok Ketetapan		
		SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)	%	SPPT	Jumlah (Rp)	%
1	2019	493	16.720.642	206	4.786.061	28,6	287	11.943.581	71,4
2	2020	496	16.971.048	136	4.082.866	24,1	360	12.888.182	75,9
3	2021	496	16.860.786	240	6.955.502	41,3	256	9.905.284	58,7
4	2022	504	20.038.847	88	3.124.686	15,6	416	16.914.161	84,4

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2023

Dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas terlihat rendahnya masyarakat Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dari tahun 2019 – 2022 realisasi tidak mencapai 50% dari jumlah pokok ketetapan, bahkan di 2022 hanya 15,6% saja dari jumlah pokok ketetapan. Hal ini menunjukkan lebih dari 84% masyarakat tidak membayar pajak. Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak, untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian: **“Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau

Komang Sentajo dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang dan memberikan kontribusi dalam pengembangan.

1.4.2 Aspek praktis

- a. Menambah wawasan keilmuan dalam hal yang berkaitan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan .
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik pada Desa Pulau Komang Sentajo itu sendiri dalam rangka mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah tercciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Gulick (dalam Syafii, 2016 : 4). administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang yang ditetapkan.

Menurut Sondang P Siagian (dalam syafii, 2016 : 5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2016 : 4) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kranenbrug (dalam Syafiie, 2016 : 25) Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada yang berdaulat.

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot (dalam Syafiie, 2016 : 22) Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi Negara. (Thoha, 2015 : 88).

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2014:21)

Dalam kegiatannya Henry Fayol (dalam Anggara, 2012 : 144) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

1. Merencanakan
2. Mengorganisasian

3. Memimpin
4. Melaksanakan pengorganisasian
5. Melaksanakan pengawasan

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).

5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*)

Berdasarkan pengertian administrasi negara diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan-urusan negara, keijakan negara dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Teori/konsep Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. (Mardijono, 2008:19)

Menurut Dr. Made Pidarta (dalam Dwiningrum, 2011 : 50) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Theodorson .(dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:81) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.(Dwiningrum, 2011:50)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.(Syafii, 2002 : 132)

Gaventa dan Valderma menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikut-sertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi (Dwiningrum, 2011:55) :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan

- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dapat dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah.

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004 : 27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah :

1. Pengetahuan dan keahlian.

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

2. Pekerjaan masyarakat.

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktu untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

3. Tingkat pendidikan dan buta huruf.

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

4. Jenis kelamin.

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu.

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Berdasarkan anak tangga dapat diasumsikan bahwa partisipasi yang mampu menggerakkan dinamika masyarakat adalah partisipasi yang diklasifikasikan ke dalam citizen power, karena dalam konteks inilah terdapat ketelibatan masyarakat sipil sebagai pilar penting dalam menggerakkan masyarakat demokratis. Secara khusus lagi Peter Oakley mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

a. *Manipulation*

Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indotrinasi.

b. *Consultation*

Stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.

c. *Consensus building*

Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok.

d. *Decision-making*

Consensus terjadi disarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu.

e. *Risk-taking*

Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan impikasi.

f. *Partnership*

Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.

g. *Self-management*

Puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian. (Dwiningrum, 2011:66)

Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi

atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu (Purnamasari, 2008:51-52):

1. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama, sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili masyarakat.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat

dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Menurut Dusseldorp dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019:84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019:91) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Dalam kenyataannya banyak pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi dari masyarakat karena kurang kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi.
2. Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak

banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi;

3. Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 2004:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap yaitu :

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*Ide planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan – pertemuan yang diadakan.
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide – ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk megoperaikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam suatu kegiatan. untuk pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2.1.3 Teori/Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina & Suryo, 2006 : 14-2)

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. (Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan)

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka telah disusun rencana pembiayaan tersebut dalam bentuk RAPBD setiap tahunnya dengan mengakumulasikan berbagai sumber pendapatan atau subsidi lainnya, apalagi daerah otonom yang dituntut kemampuannya untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan modal pembiayaan sendiri pula.

Jenis-jenis pajak

a. Menurut golongannya:

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya:

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutnya:
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - a. Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM).
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - e. Bea Materai.
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Pajak provinsi terdiri dari:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

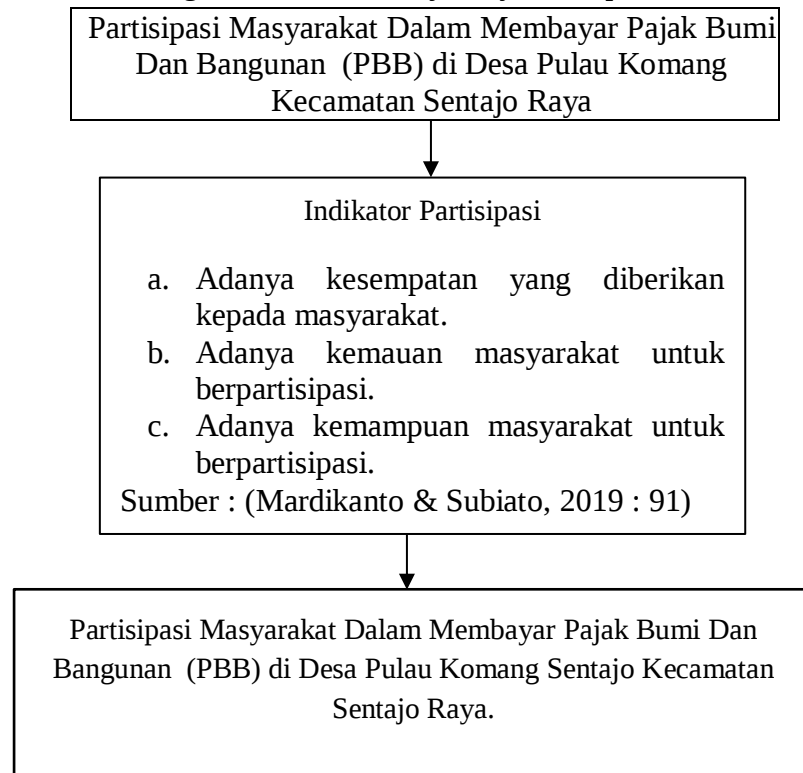
1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. (Sugiono, 2009 : 91). Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Peneliti 2023

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “diduga Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah.”

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di

Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator :

1. Dalam kenyataannya banyak pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi dari masyarakat karena kurang kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dilain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi.
2. Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi;
3. Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya.

2.5 Konsep Variabel

Tabel 2.1 : Konsep Operasional Variabel Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Ukuran
Konsep Partisipasi Masyarakat menurut	Partisipasi Masyarakat	1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Mardikanto & Subiato, 2019 : 91	2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
	3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2019 : 16).

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2015 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2019 : 126).

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019:127).

Populasi Penelitian ini adalah Masyarakat Pulau Komang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang berjumlah 504. Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah sampel

N : Populasi

E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{504}{1 + 504 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{504}{1 + 504 (0,0225)}$$

$$n = \frac{504}{1 + 11,34}$$

$$n = \frac{504}{12,34} \qquad n = 40,84 = 41 \text{ responden (digenapkan)}$$

Adapun yang menjadi informan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 3.1 : Populasi dan Sampel Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa Pulau Komang	1	1	100%
2	Sekretaris Desa Pulau Komang	1	1	100%
3	KAUR Umum	1	1	100%
4	KAUR Pemerintahan	1	1	100%
5	KAUR Pembangunan	1	1	100%
6	Ketua BPD	1	1	100%
7	Masyarakat Pulau Komang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)	504	41	8.1%
Jumlah		600	47	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2023

Jadi jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah 47 orang, teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel untuk Perangkat Desa adalah Sampel Jenuh yakni Semua populasi dijadikan sampel yang berjumlah 6 orang, dan sampel untuk Masyarakat Pulau Komang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menggunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu yang berjumlah 41 Orang.

3.3 Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

3.3.1 Data primer

Data primer ialah data yang peneliti peroleh langsung dari Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, dan data yang diambil dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena ingin mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. (Sugiyono, 2019 : 199)

3.5.2 Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2019 : 203).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2019 : 210).

3.6 Metode Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasrakna skala likert berikut ini :

SB = Sangat baik diberi skor 5

B = Baik diberi skor 4

CB = Cukup Baik diberi skor 3

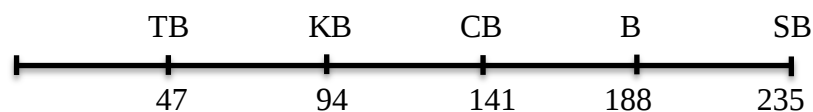
KB = Kurang Baik diberi skor 2

TB = Tidak Baik diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Total} = \text{Jawaban Responden} \times \text{Skor}$$

Setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : (Sugiyono, 2019 : 148)



- 00 - 47 = Tidak Baik
 48 - 94 = Kurang Baik
 95 - 141 = Cukup Baik
 142 - 188 = Baik
 189 - 235 = Sangat Baik.

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 : Jadwal penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2022-2023															
		September-Desember								Januari-Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x															
2	Persiapan Pembuatan Proposal		x	x	x												
3	Bimbingan Proposal					x	x	x	x	x	x	x	x				
4	Seminar Proposal													x			
5	Revisi setelah seminar Proposal														x	x	x

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2023

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pulau Komang Sentajo

Desa pulau komang sentajo yang dimaksud disini belum ada dan saat ini memang tidak ada sejarahnya yang menceritakan detail tentang berdirinya desa pulau komang. Berdasarkan narasumber yang di himpun dari kenegrian sentajo terdapat satu kesatuan yang disebut banjar. Seiring dengan perjalanan waktu karena semakin ramainya penduduk banjar ini sehingga sebagian dari penduduk kenegrian sentajo ini membuka lahan yang pada saat ini masih lahan belukar dan hutan. Dari pembukaan lahan baru masyarakat berpencar dari kenegrian sehingga dapat beriringnya pergantian waktu maka berdirilah apa yang disebut banjar (dusun) baru yang terdiri dari banjar pulau komang, muaro sentajo, koto sentajo, kampung baru sentajo dan pulau kopung sentajo.

Pada tahun 1976, banjar-banjar tersebut berubah menjadi desa yang mana pada saat ini jumlah desa di kenegerian sentajo yaitu sebanyak 5 desa sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan berdirinya desa-desa yang merupakan pecahan dari bagian banjaran atau yang sekarang lebih disebut dengan nama dusun, maka pada tahun 1977 desa pulau komang itu sendiri adalah daerah yang berkembang.

Setelah pulau komang disahkan menjadi desa yang merupakan bagian dari kenegrian sentajo, sehingga pada saat ini seiring dengan prubahan waktu para pengembang tampuk pemerintahan selalu berganti, pergantian ini di rasakan oleh desa dari masa ke masa sehingga perubahan demi perubahan terjadi di desa ini.

Diantaranya tokoh atau kepala desa ma ke masa adalah :

- 1) ALM. Djalinus, MS
- 2) Junaidi
- 3) H.Syafriyanto.N
- 4) Syawaluddin
- 5) Arfizon

Untuk syarat terbentuknya sebuah desa pulau komang juga memiliki beberapa dusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Dusun yang ada di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Dusun	RW	RT
1	Kubu Jaya	2	4
2	Karak	1	2
3	Koto Tuo	2	4
Jumlah		5	10

Sumber : Data Desa Pulau Komang

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Desa Pulau Komang Sentajo merupakan bagian desa dari Kenegrian Sentajo, dimana Kenegrian Sentajo memiliki 5 desa yaitu desa pulau komang sentajo, Pulau Komang Sentajo, koto sentajo, kampung baru sentajo, dan pulau kopung sentajo:

1. Sebelah Utara : Desa Muaro Sentajo
2. Sebelah Timur : Desa Sawah Taluk
3. Sebelah Selatan : Desa Baringin Taluk
4. Sebelah Barat : Batang Kuantan / Desa Kopah dan Pulau Kopung

4.2.2 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Desa Pulau Komang adalah 3812 Ha. Yang terdiri dari Pemukiman, Pertanian, Ladang/tegalan, Perkebunan, Hutan, Rawa-rawa, Perkantoran, Sekolah, Jalan, Lapangan sepak bola.

Jarak Desa Pulau Komang dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : ± 10 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 1 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : ± 5 Menit

4.2.3 Penduduk

Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Penduduk Jumlah penduduk keseluruhan 1640 Jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 810 orang dan Perempuan 830 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	810	49,4%
2	Perempuan	830	50,6%
Jumlah		1640	100%

Sumber : Desa Pulau Komang 2023

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah Perempuan dari pada laki-laki. Adapun jumlah laki-laki 810 orang dengan persentase 49,4% sedangkan jumlah perempuan 830 orang dengan persentase 50,6%.

Kemudian dapat dijelaskan jumlah penduduk Desa Pulau Komang berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 : Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	TK / PAUD	40	2%
2	SD/M1	405	25%
3	SLTP/MTs	420	26%
4	SLTA/MA	640	39%
5	S1/Diploma	120	7%
6	Putus Sekolah	15	1%
7	Buta Huruf	-	-
	Jumlah	1640	100%

Sumber : Desa Pulau Komang 2023

Berdasarkan tabel diatas Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Komang yang terbanyak adalah tamatan SLTP/MTs.

4.2.4 Lembaga Pendidikan

Untuk melihat gambaran Lembaga pendidikan masyarakat Pulau Komang dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan didesa Pulau Komang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	1
2	Gedung MDTA	1
3	SD/MI	1
4	SMP/ sederajat	-
5	SMA/ sederajat	-
	Jumlah	3

Sumber : Desa Pulau Komang 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana pendidikan masyarakat desa Pulau Komang belum cukup memadai, diharapkan kedepannya pemerintah meningkatkan lagi sarana pendidikan ini.

Selain sarana pendidikan, Desa Pulau Komang juga terdapat sarana olahraga, berikut sarana olahraga yang ada pada desa Pulau Komang:

Tabel 4.5 Jumlah Sarana olahraga didesa Pulau Komang

No	Sarana olahraga	Jumlah
1	Lapangan sepak bola	1 buah
2	Lapangan bulu tangkis	1 buah
3	Meja pingpong	1 buah
4	Lapangan tenis	-- buah
5	Lapangan voli	2 buah
Jumlah		5

Sumber : Desa Pulau Komang 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa didesa Pulau Komang juga terdapat sarana olahraga yang cukup lengkap.

4.2.5 Keagamaan

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang.

Berikut jumlah penduduk Desa Pulau Komang berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Pulau Komang

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Jumlah
Islam	810 orang	830 orang	833 (100%)
Kristen	-	-	-
Katholik	-	-	-
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-
Khonghucu	-	-	-
Jumlah	810 orang	830 orang	1640 Orang

Sumber : Desa Pulau Komang 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa mayoritas penduduk desa Pulau Komang mayoritas beragama islam dengan persentase 100%. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan ibadah. Sarana rumah ibadah didesa Pulau Komang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Pulau Komang

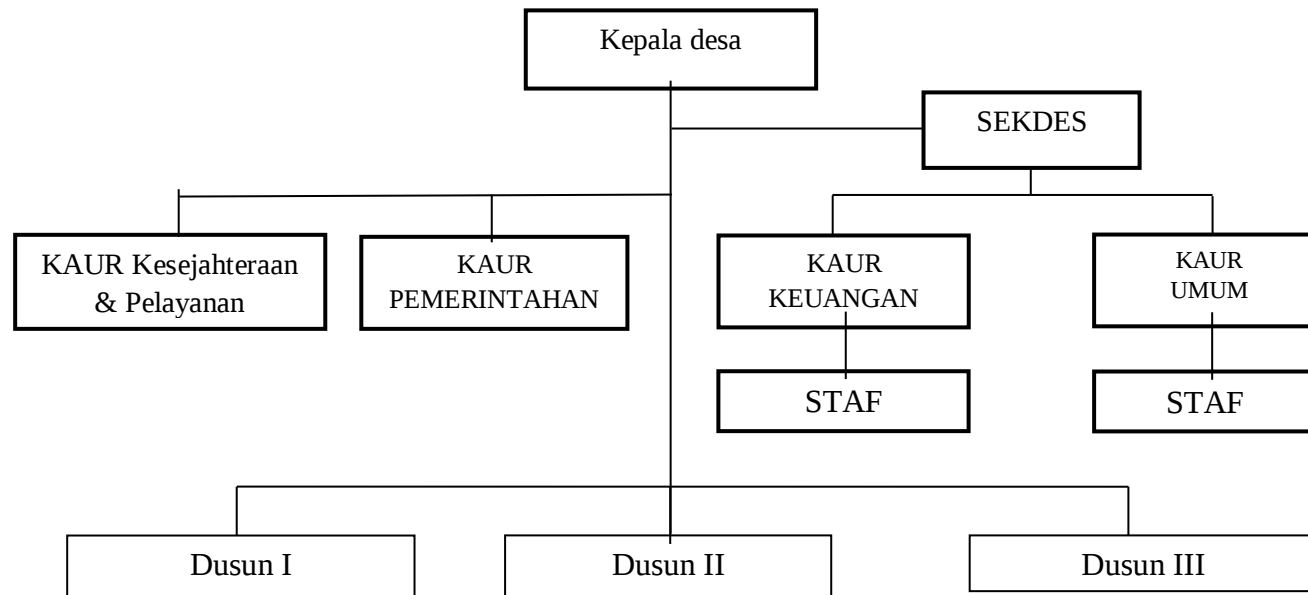
No	Jenis Agama	Jumlah
1	Jumlah Masjid	1 buah
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	5 buah
3	Jumlah Gereja	-- buah
4	Jumlah Wihara	-- buah
Jumlah		6

Sumber : Desa Pulau Komang 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa di Desa Pulau Komang terdapat cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Yang mayoritas sarana ibadah yang beragama islam yaitu mushola dan Mesjid ini selain untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja.

4.2.6 Struktur Oranisasi Desa

Pemerintah Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut :



Sumber : Kantor Desa Pulau Komang

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

B. Sekretaris Desa

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;

5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

C. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;

5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa);
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Kepala Urusan Keuangan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

E. Kepala Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;

7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 47 orang. Dan didapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden didapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	27	57%
2	Perempuan	20	43%
Jumlah		47	100

Sumber : Modifikasi Penelitian 2023

Dari tabel 5.1 diatas pat dilihat jumlah responden sebanyak 47 orang, dimana jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 27 orang dengan persentase 57%, dan jumlah responden perempuan adalah sebanyak 20 orang dengan persentase 43%.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat umur (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	12	26 %
2	31 – 40	13	28 %

3	41 – 50	15	32 %
4	>51	7	15 %
	Jumlah	47	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2023

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berumur kecil dari 30 tahun yaitu sebanyak 12 orang (26%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 13 orang (28%) dan antara umur 41-50 tahun sebanyak 15 orang (32%), serta umur antara diatas 51 tahun sebanyak 7 orang (15%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu usia dari 41-50 tahun.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Adapun responden dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Pegawai	14	26%
2	Wiraswasta	19	36%
3	Petani	12	23%
4	Lainnya	8	15%
	Jumlah	47	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2023

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan responden sebagai pegawai yaitu sebanyak 14 orang (26%), wiraswasta sebanyak 19 orang (36%), Petani sebanyak 12 orang (23%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 8 orang (15%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai Wiraswasta.

5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun Pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTP	12	26%
2	SLTA	25	53%
3	Diploma	1	2%
4	Strata I	9	19%
5	Strata II	-	-
Jumlah		47	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2023

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan SLTP sebanyak 12 orang (26%), SLTA sebanyak 25 orang (53%), Diploma sebanyak 1 orang (2%), Strata I sebanyak 9 orang (19%), Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak ialah yang berpendidikan SLTA.

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5, dengan kategori yang digunakan sebagai berikut :

00 - 47	= Tidak Baik
48 – 94	= Kurang Baik
95 - 141	= Cukup Baik
142 - 188	= Baik
189 - 235	= Sangat Baik

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada setiap indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang dipaparkan berikut ini:

5.2.1 Indikator Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat Main Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

Berikut tanggapan responden untuk item pertama dengan pertanyaan Menurut Bapak/ibu/i bagaimana informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden tentang Informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	6	24	13%
	Cukup Baik	3	12	36	26%
	Kurang Baik	2	27	54	57%
	Tidak Baik	1	0	0	-
Jumlah			47	124	100

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 6 responden (13%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 12 responden (26%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 27 responden (57%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 124. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 95 - 141.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 124 Dan nilai rata-rata ini dapat menunjukkan informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan pada kategori Cukup baik, dan berdasarkan observasi penulis lapangan bahwa informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebenarnya sudah cukup baik, namun observasi

dilapangan menurut masyarakat pemerintah desa memberikan pajak yang akan dibayarkan dekat ke akhir tahun, sehingga terkadang pada saat pemungut pajak dari pemerintah desa memberikan pajak yang akan di bayarkan kepada masyarakat tak jarang masyarakat sedang tidak ada uang, meskipun hanya sedikit jumlahnya, dan dari penjelasan pemerintah desa bukan mereka yang lambat membagikan kepada masyarakat, tapi memang dari kantor bapenda yang lama memberikan ke desa.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang, dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini:

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden mengenai Petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	2		4%
	Baik	4	4	10	9%
	Cukup Baik	3	7	16	15%
	Kurang Baik	2	26	21	55%
	Tidak Baik	1	8	52	17%
Jumlah			47	107	100

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (9%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 7 responden (15%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 26 responden (55%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 8 responden (17%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 107. Dari nilai ini dapat menunjukkan Petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 95 – 141

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 107. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang pada kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa Petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang belum sepenuhnya baik, karena sosialisasi yang kurang, baik kepada pemungut maupun masyarakat, terkadang ada masyarakat yang enggan membayar karena baginya untuk apa membayar pajak itu, mereka tak mengerti fungsi pajak tersebut, selain itu jumlah pajak yang harus dibayar tidak wajar menurut masyarakat sehingga enggan untuk membayar.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5.7 Tanggapan Responden mengenai informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	6	24	13%
	Cukup Baik	3	26	78	55%
	Kurang Baik	2	13	26	28%
	Tidak Baik	1	0	0	-
Jumlah			47	138	100

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.7 di atas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), menjawab Baik sebanyak 7 responden (15%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 26 responden (55%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 13 responden (28%). Maka dari hasil

perhitungan diperoleh rata-rata = 138. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 95 - 141.

Dan hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 137. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya pada kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya sudah cukup baik, pemerintah desa selalu menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang kepada masyarakat, hanya saja pemerintah desa memberikan surat pemberitahuan pajak terutang tergantung informasi dari dinas.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya pada tabel 5.8 di bawah ini:

Tabel 5.8 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan	2	6	12	27	0	47	124
2	Petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang?	2	4	7	26	8	47	107

3	Informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya?	1	7	26	13	0	47	138
Jumlah		6	16	45	66	8	141	123
Jumlah Responden		2	5	15	22	3	47	
Persentase		4	11	32	47	6	100	

Sumber : Data Olahan 2023

Dan tabel 5.8 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 1 responden (3%), menjawab Baik sebanyak 6 responden (12%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 15 responden (33%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 22 responden (47%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 3 responden (6%). Maka secara rata-rata adalah 122. Dan nilai rata-rata ini dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya adalah cukup baik, terlihat dengan informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya sudah cukup baik, pemerintah desa selalu menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang kepada masyarakat, hanya saja pemerintah desa memberikan surat pemberitahuan pajak terutang tergantung informasi dari dinas, informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan menurut masyarakat pemerintah desa memberikan pajak yang akan dibayarkan dekat ke akhir tahun, sehingga terkadang pada saat pemungutan pajak dari pemerintah desa memberikan pajak yang akan dibayarkan kepada masyarakat tak

jarang masyarakat sedang tidak ada uang, meskipun hanya sedikit jumlahnya, dan dari penjelasan pemerintah desa bukan mereka yang lambat membagikan kepada masyarakat, tapi memang dari kantor bapenda yang lama memberikan ke desa, hanya saja Petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang belum sepenuhnya baik, karena sosialisasi yang kurang, baik kepada pemungut maupun masyarakat, terkadang ada masyarakat yang enggan membayar karna baginya untuk apa membayar pajak itu, mereka tak mengerti fungsi pajak tersebut, selain itu jumlah pajak yang harus dibayar tidak wajar menurut masyarakat sehingga enggan untuk membayar.

5.2.2 Indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama yaitu dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB?, dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini

Tabel 5.9 : Tanggapan Responden tentang tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	0	0	-
	Baik	4	1	4	2%
	Cukup Baik	3	43	129	92%
	Kurang Baik	2	3	6	6%
	Tidak Baik	1	0	0	-
Jumlah			47	139	100

Sumber : Data Olahan 2023

Dan tabel 5.9 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 1 responden (2%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 43 responden (92%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 3 responden (6%).

Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 139. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 95 - 141.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 139. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB pada kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa sebenarnya tingkat kesadaran sudah cukup baik, hanya saja banyak keterbatasan masyarakat, dimana ingin bayar cepat tapi surat pajak nya belum sampai ditangan masyarakat, dan ada pula yang surat diterima tapi pada saat tak punya uang, meski juga terdapat yang masyarakat tidak peduli soal PBB ini, karena sudah di informasikan agar daftarkan pbb, namun masih acuh.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB, dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden mengenai ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	0	0	-
	Baik	4	0	0	-
	Cukup Baik	3	39	117	83%
	Kurang Baik	2	8	16	17%
	Tidak Baik	1	0	0	-
Jumlah			47	133	100

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat Tanggapan responden tidak ada yang menjawab Sangat Baik dan Baik, yang menjawab Cukup Baik sebanyak 39 • responden (83%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 8 responden (17%), dan

tidak ada yang menjawab Tidak Baik. Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 133. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 95 - 141.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 133 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB pada kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB memang sudah cukup Baik, hanya saja menurut masyarakat pemerintah desa/Pemungut pajak desa memberikan pajak yang akan dibayarkan dekat ke akhir tahun, sehingga terkadang pada saat pemungut paak dari pemerintah desa memberikan pajak yang akan di bayarkan kepada masyarakat tak jarang masyarakat sedang tidak ada uang, meskipun hanya sedikit jumlahnya.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.11 : Tanggapan Responden mengenai Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	0	0	-
	Baik	4	3	12	6%
	Cukup Baik	3	36	108	77%
	Kurang Baik	2	8	16	17%
	Tidak Baik	1	0	0	-
Jumlah			47	136	100

Sumber : Data Olahan 2023

Dan tabel 5.11 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 3 responden (6%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 36 responden (77%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 8 responden (17%), tidak ada yang menjawab sangat baik dan tidak baik. Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 136. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 95 - 141.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata -rata = 136 Dan nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB pada kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB sebenarnya belum baik, terlihat dengan masyarakat yang sudah diberitahukan oleh pemungut pajak/ pemerintah desa agar mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB, namun tidak menggubris arahan / infon-nasi yang diberikan.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya pada tabel 5.12 di bawah ini:

Tabel 5.12 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB?	0	1	43	3	0	47	139

2	ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB?	0	0	39	8	0	47	133
3	Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB?	0	3	36	8	0	47	136
Jumlah		0	4	118	19	0	141	136
Jumlah Responden		0	1	39	6	0	47	
Persentase		0	3	84	13	0	100	

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.12 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pada kategori menjawab Baik sebanyak 1 responden (3%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 39 responden (84%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 6 responden (13%), tidak ada yang menjawab sangat baik dan Tidak Baik. Maka secara rata-rata adalah 136. Dari nilai rata-rata ini bahwa respon terhadap indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya adalah cukup baik, namun pada kenyataannya belum sepenuhnya baik, terlihat dengan ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB sebenarnya belum baik, terlihat dengan masyarakat yang sudah diberitahukan oleh pemungut pajak/ pemerintah desa agar mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB, namun tidak menggubris arahan / informasi yang diberikan, Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB sebenarnya belum baik, terlihat dengan masyarakat yang sudah diberitahukan oleh pemungut pajak/ pemerintah desa agar mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB. namun tidak menggubris arahan / informasi yang

diberikan, kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis dilaporkan bahwa sebenarnya tingkat kesadaran sudah cukup baik, hanya saja banyak keterbasatan masyarakat, dimana ingin bayar cepat tapi surat pajak nya belum sampai ditangan masyarakat, dan ada pula yang surat diterima tapi pada saat tak punya uang, meski juga terdapat yang msayarakat tidak peduli soal PBB ini, karena sudah di informasikan agar daftarkan pbb, namun masih acuh.

5.2.3 Indikator Adanya Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

Berikut tanggapan responden untuk item pertama dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana kemampuan masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut ini:

Tabel 5.13 : Tanggapan Responden tentang kemampuan masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	0	0	-
	Baik	4	1	4	2%
	Cukup Baik	3	32	96	68%
	Kurang Baik	2	12	24	26%
	Tidak Baik	1	2	2	4%
Jumlah			47	13	100

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.13 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 1 responden (2%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 32 responden (68%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 12 responden (26%), dan yang menjawab tidak Baik sebanyak 2 responden (4%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 126. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan

kemampuan masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 95 - 141.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 126. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Kemampuan masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya pada kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan sebenarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan tidaklah banyak, berkisar belasan hingga puluhan ribu saja pertahunnya, bahkan rata-rata hanya belasan ribu saja, hanya saja terkadang ada masyarakat yang menunggak. sehingga bayar PBB jadi banyak karena tunggakan tersebut. Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden mengenai kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	0	0	-
	Baik	4	2	8	4%
	Cukup Baik	3	9	27	19%
	Kurang Baik	2	20	40	43%
	Tidak Baik	1	16	16	34%
Jumlah			47	91	100

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 2 responden (4%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 9 responden (19%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 20 responden (43%). dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 16 responden (34%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 91. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan

kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak pada kategori Kurang Baik yang berada pada skala 48 - 94.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 91 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak pada kategori Kurang Baik, hasil jawaban masyarakat rata-rata menyebut kurang baik dikarenakan masyarakat tidak memahami bagaimana sistem perhitungan penentuan jumlah pajaknya, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sebenarnya sudah baik, yang mana jumlah jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan masyarakat semua sudah di hitung oleh sistem, menurut penjelasan pegawai kantor Badan pendapatan daerah terdapat kategori yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. untuk perhitungan PBB, ada kelas-kelas lokasi semisal di pusat kota jumlah pajak nya lain dengan yang jauh dari pusat kota, selain dari lokasi tentunya luas tanah dan bangunanya juga mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan, terlebih lagi pajak PBB juga mengalami kenaikan serta terdapat denda pajak yang tahun sebelumnya tidak dibayar oleh wajib pajak.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam membayar PBB dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut ini :

Tabel 5.15: Tanggapan Responden mengenai kemudahan akses masyarakat dalam membayar PBB.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	0	0	-
	Baik	4	8	32	17%
	Cukup Baik	3	32	96	68%
	Kurang Baik	2	7	14	15%
	Tidak Baik	1	0	0	-
Jumlah			47	142	100

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.15 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 8 responden (17%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 32 responden (68%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 7 responden (15%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 142. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan kemudahan akses masyarakat dalam membayar PBB pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 95 - 141.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata -rata = 142 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Kemudahan akses masyarakat dalam membayar PBB pada kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa kemudahan akses masyarakat dalam membayar PBB memang sudah cukup baik dimana saat ini banyak cara untuk membayar PBB, tak perlu ke kantor pajak lagi, saat ini masyarakat dapat membayar PBB melalui M-Banking, serta saat ini pemerintah desa memfasilitasi masyarakat membayar PBB melalui desa.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Kornang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya pada tabel 5 16 di bawah ini:

Tabel 5.16 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan PBB.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Kemampuan masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya?	0	1	32	12	2	47	126
2	Kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak?	0	2	9	20	16	47	91
3	Kemudahan akses masyarakat dalam membayar PBB?	0	8	32	7	0	47	142
Jumlah		0	11	73	39	18	141	120
Jumlah Responden		0	4	24	13	6	47	
Persentase		0	8	52	28	13	100	

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.16 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pada kategori Baik sebanyak 4 responden (8%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 24 responden (52%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 13 responden (28%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 6 responden (13%). Maka secara rata-rata adalah 120. Dari nilai rata-rata ini dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Rava adalah cukup baik, meski Kemampuan masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya pada kategori Cukup Baik, sebenarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan tidaklah banyak, berkisar belasan

hingga puluhan ribu saja pertahunnya, bahkan rata-rata hanya belasan ribu saja, hanya saja terkadang ada masyarakat yang menunggak, sehingga bayar PBB jadi banyak karena tunggakan tersebut, kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak pada kategori Kurang Baik, hasil jawaban masyarakat rata-rata menyebut kurang baik dikarenakan masyarakat tidak memahami bagaimana sistem perhitungan penentuan jumlah pajaknya, dan berdasarkan observasi penulis didapatkan bahwa kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sebenarnya sudah baik, yang mana jumlah jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan masyarakat semua sudah di hitung oleh sistem, menurut penjelasan pegawai kantor Badan pendapatan daerah terdapat kategori yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. untuk perhitungan PBB, ada kelas-kelas lokasi semisal di pusat kota jumlah pajak nya lain dengan yang jauh dari pusat kota, selain dari lokasi tentunya luas tanah dan bangunanya juga mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan, terlebih lagi pajak PBB juga mengalami kenaikan serta terdapat denda pajak yang tahun sebelumnya tidak dibayar oleh wajib pajak, kemudahan akses masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan memang sudah cukup baik di mana ini banyak cara untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tak perlu ke kantor pajak lagi, saat ini masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui M-Banking, serta saat ini pemerintah desa memfasilitasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui desa.

5.3 Rekapitulasi Keseluruhan indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut rekapitulasi tanggapan responden pada keseluruhan indikator responden dapat dilihat pada tabel 5.17 di bawah ini :

Tabel 5.17: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	2	5	15	22	3	47	123
2	Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	0	1	39	6	0	47	136
3	Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	0	4	24	13	6	47	120
Jumlah		2	10	78	41	9	141	126
Jumlah Responden		1	3	26	14	3	47	
Persentase		1	7	55	29	6	100	

Sumber : Data Olahan 2023

Dari tabel 5.17 diatas dapat diketahui tanggapan responden yang menjawab Sangat baik sebanyak 1 responden (1%), responden yang menjawab baik sebanyak 3 responden (7%), yang menjawab Cukup baik sebanyak 26 responden (55%), yang menjawab Kurang baik sebanyak 14 responden (29%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 3 responden (6%). Maka secara rata-rata adalah 126 yang berada pada Interval 95 — 141, berada pada interval cukup baik, terlihat indikator Adanva kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam

Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya adalah cukup baik, terlihat dengan informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya sudah cukup baik, pemerintah desa selalu menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang kepada masyarakat, hanya saja pemerintah desa memberikan surat pemberitahuan pajak terutang tergantung informasi dari dinas, informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan menurut masyarakat pemerintah desa memberikan pajak yang akan dibayarkan dekat ke akhir tahun, sehingga terkadang pada saat pemungutan pajak dari pemerintah desa memberikan pajak yang akan dibayarkan kepada masyarakat terkadang masyarakat sedang tidak ada uang, meskipun hanya sedikit jumlahnya, dan dari penjelasan pemerintah desa bukan mereka yang lambat membagikan kepada masyarakat, tapi memang dari kantor bapenda yang lama memberikan ke desa, hanya saja Petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang belum sepenuhnya baik, karena sosialisasi yang kurang, baik kepada pemungut maupun masyarakat, terkadang ada masyarakat yang enggan membayar karena baginya untuk apa membayar pajak itu, mereka tak mengerti fungsi pajak tersebut, selain itu jumlah pajak yang harus dibayar tidak wajar menurut masyarakat sehingga enggan untuk membayar, Indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pada kategori menjawab Baik sebanyak 1 responden (3%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 39 responden (84%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 6 responden (13%), tidak ada yang menjawab sangat baik

dan Tidak Baik. Maka secara rata-rata adalah 136. Dari nilai rata-rata ini bahwa respon terhadap indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya adalah cukup baik, namun pada kenyataannya belum sepenuhnya baik, terlihat dengan ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB sebenarnya belum baik, terlihat dengan masyarakat yang sudah diberitahukan oleh pemungut pajak/ pemerintah desa agar mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB, namun tidak menggubris arahan / informasi yang diberikan, Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB sebenarnya belum baik, terlihat dengan masyarakat yang sudah diberitahukan oleh pemungut pajak/ pemerintah desa agar mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB, namun tidak menggubris arahan / informasi yang diberikan, kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa sebenarnya tingkat kesadaran sudah cukup baik, hanya saja banyak keterbasatan masyarakat, dimana ingin bayar cepat tapi surat pajak nya belum sampai ditangan masyarakat, dan ada pula yang surat diterima tapi pada saat tak punya uang, meski juga terdapat yang msayarakat tidak peduli soal PBB ini, karena sudah di informasikan agar daftarkan pbb, namun masih acuh, serta indikator Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya adalah cukup baik, meski Kemampuan masyarakat dalam membayar

PBB setiap tahunnya pada kategori Cukup Baik, sebenarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan tidaklah banyak, berkisar belasan hingga puluhan ribu saja pertahunnya, bahkan rata-rata hanya belasan ribu saja, hanya saja terkadang ada masyarakat yang menunggak, sehingga bayar PBB jadi banyak karena tunggakan tersebut, kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak pada kategori Kurang Baik, hasil jawaban masyarakat rata-rata menyebut kurang baik dikarenakan masyarakat tidak memahami bagaimana sistem perhitungan penentuan jumlah pajaknya, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sebenarnya sudah baik, yang mana jumlah jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan masyarakat semua sudah di hitung oleh sistem, menurut penjelasan pegawai kantor Badan pendapatan daerah terdapat kategori yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. untuk perhitungan PBB, ada kelas-kelas lokasi semisal di pusat kota jumlah pajaknya lain dengan yang jauh dari pusat kota, selain dari lokasi tentunya luas tanah dan bangunanya juga mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan, terlebih lagi pajak PBB juga mengalami kenaikan serta terdapat denda pajak yang tahun sebelumnya tidak dibayar oleh wajib pajak, kemudahan akses masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan memang sudah cukup baik di mana saat ini banyak cara untuk membayar PBB, tak perlu ke kantor pajak lagi, saat ini masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui M-Banking, serta saat ini pemerintah desa memfasilitasi masyarakat membayar PBB melalui desa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata 126 berarti berada pada interval Cukup Baik, serta hasil observasi penulis memang sudah cukup baiknya Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan keseluruhan indikator yang diuji yakni adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berprestasi sudah cukup baik.

6.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah desa lebih lebih gencar mensosialisasikan mengenai perpajakan ini kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui fungsi pajak yang dibayarkan, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar maupun mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB.
2. Diharapkan diharapkan pihak Pemerintah desa untuk mengetahui bagaimana bisa dapat jumlah pajak yang akan dibayarkan masyarakat dikarenakan masyarakat banyak yang bertanya mengenai jumlah pajak terhutang ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, Sahya, 2015. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Dwiningrum, Astuti. 2014. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Purnamasari, Irma. 2016. *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Tesis.PPsUNDIP
- Silalahi, Ulber. 2014. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2016. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Thoha, Miftah, 2015. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Valentina Sri S. dan Aji Suryo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Batam